

Pengaruh *Whistleblowing System* dan Tata Kelola Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur

Elok Faiqoh, Aceu Ardiansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

email : elokfaiqohhimmah@unibi.ac.id, aceuardiansyah62@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak *wistleblowing system* dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Metode penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Pada hasil uji analisis diketahui bahwa kedua variabel independen tersebut yaitu *whistleblowing system* dan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Pengaruh signifikan yang dimaksud adalah semakin tinggi penerapan *whistleblowing system* semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan, sehingga *whistleblowing system* dapat dijadikan sebagai tindak preventif atas kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Kemudian, tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan artinya semakin bagus tata kelola perusahaan dalam hal ini kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang digunakan pada sampel ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

Kata kunci: *whistleblowing system*, kepemilikan manajerial, kecurangan laporan keuangan.

1. PENDAHULUAN

Menghadapi tantangan global membuat sebuah sistem industri yang harus tumbuh cepat dan adaptif. Hanya saja adaptif saja tidak akan cukup jika tidak diselarasakan dengan integritas. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi terutama di Indonesia menjadikan tolak ukur bahwa semakin berkembangnya dunia industri tidak diimbangi dengan integritas yang bagus. Mengutip dari pernyataan Himmah (2022) bahwa kasus kecurangan laporan keuangan tahun 2012 sebesar 7.60% dan 2014 meningkat sebesar 9.0%, kemudian 2016 meningkat sebesar 9.60%, untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 semakin naik dengan presentasi 10%.

Association of Certified Fraud Examiners juga melakukan survei pada tahun 2016 dan 2020 yang menunjukkan bahwa tingkat kecurangan tertinggi pada perusahaan manufaktur dan lembaga keuangan. Bahkan, hasil analisis Himmah (2022) menunjukkan bahwa tingkat kecurangan di Indonesia terdeteksi

meningkat pada industri perbankan. Dalam hal ini terdapat peluang yang berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Himmah, 2022).

Kusuma dkk (2021) menyatakan bahwa fraud yang terjadi pada sebuah lembaga perbankan adalah korupsi dan penyalahgunaan aset. Pernyataan ini didukung oleh analisis Himmah (2022) bahwa terdapat peran manajemen dalam mengendalikan laporan keuangan dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan, pengendalian internal yang memadai dan menerapkan tata kelola.

Peran pemerintah, pakar profesional bidang *auditing & finance* telah menyusun beberapa kebijakan mengenai pencegahan fraud atas laporan keuangan. Salah satunya adalah Standar Audit Section 316 menjelaskan bahwa tanggung jawab auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan adalah auditor bertanggung jawab untuk

merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Selain itu, pemerintah sendiri untuk menangani fraud terutama pada institusi dibawa pemerintahan dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) badan yang memiliki tanggung jawab dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan terutama korupsi. Dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan laporan keuangan disebut sebagai *whistleblowing system*.

Whistleblower bertugas mengungkapkan tindak kecurangan yang terjadi, dengan segala risiko-risiko yang dapat menjadi konsekuensi bagi pengungkap atas laporan keuangan (Malik, 2010). *Whistleblowing system* akan menjadi alat yang efektif mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud, sehingga dapat dideteksi dan dilakukan tindak pencegahan lebih cepat sebelum menjadi kasus yang lebih merugikan.

Selain *whistleblowing system* yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Tata kelola perusahaan juga harus terbentuk secara efektif dan efisien dalam mencegah dan mendeteksi laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berjudul “Pengaruh *Whistleblowing System* dan Tata Kelola Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavioral*

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Ajzen dan diberi nama *Theory of Planned Behaviour* (TPB) (Lee & Kotler, 2011, hal. 199). *Theory of Planned Behavior* dijelaskan sebagai konstruk yang melengkapi TRA. Menurut

(Lee & Kotler, 2011, hal. 199), target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut, mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Teori perilaku perencanaan (*theory of planned behavioral*) dapat memiliki 2 fitur yaitu:

1. Teori ini mengansumsi bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) mempunyai implikasi motivasional terhadap minat. Orang – orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut.
2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) dengan perilaku. Di banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan demikian. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara langsung. Di model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) langsung ke perilaku (*behavior*).

Teori perilaku perencanaan menganggap bahwa teori sebelumnya mengenai perilaku yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu melainkan, juga dipengaruhi oleh faktor mengenai faktor non motivasional yang dianggap sebagai kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Ajzen menambahkan satu determinan lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku (Asadifard, Rahman, Aziz, & Hashim, 2015).

2.2. Kecurangan atas Laporan Keuangan

Standar Auditing (SA) seksi 316 mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan serta terdapat efek yang timbul berupa ketidaksesuaian laporan keuangan dalam semua hal yang material dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kecurangan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan cara, pertama manipulasi, pemalsuan dan perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Kedua, representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan seperti penghilangan secara sengaja peristiwa, transaksi atau informasi signifikan. Ketiga, salah penerapan prinsip akuntansi secara sengaja yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, serta cara pengungkapan. Manipulasi atas laporan keuangan yang sering dilakukan oleh manajemen sebagai solusi jangka pendek yaitu manajemen laba (*earning management*) yang bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan investor

terhadap kinerja perusahaan (Septriyani & Handayani, 2018).

2.3. Wistleblowing System

Whistleblowing artinya sebagai usaha pengungkapan atas perbuatan pelanggaran atau pengungkapan tindakan-tindakan yang melawan ketentuan dan melawan hukum, segala bentuk tindakan yang tidak etis untuk dilakukan/ amoral/ pengungkapan tindakan jenis lainnya yang bisa membuat perusahaan/ lembaga/ organisasi mengalami kerugian. Pengungkapan ini biasanya dilakukan oleh komite audit dan audit internal atau dilakukan oleh perorangan (pimpinan) kepada semua anggota organisasi, perusahaan, lembaga, instansi jenis lainnya bisa melakukan sebuah langkah berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi.

2.4 Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance (selanjutnya disebut sebagai CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. BEI sebagai fasilitator dan regulator pasar modal di Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi Bursa Efek yang sehat dan berdaya saing global.

Penerapan komitmen CG yang baik atau biasa disebut Good Corporate Governance (GCG) terkandung pada misi Perusahaan yaitu menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance.

BEI telah berhasil menerapkan pedoman, kerangka kerja serta prinsip-prinsip CG secara efektif dan efisien dalam kegiatan operasional Perusahaan dan senantiasa memperbaiki praktik CG

di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan GCG dapat berdampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta kehandalan dan peningkatan kualitas informasi kepada publik.

2.3 Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Setiap entitas bisnis tentu akan menghadapi problematika perbedaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Kepentingan pribadi ini lah yang menjadikan kondisi dimana mendorong terjadinya *moral hazard* yaitu kecurangan. Terdapat Utami (2018) menyebutkan bahwa dari ke empat penyebab tindak kecurangan, faktor “kesempatan” merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan organisasi suatu entitas.

Praktik tindak kecurangan dapat diminimalisir dengan *good governance* salah satunya dengan penerapan *whistleblowing system*. *Good Governance* merupakan fondasi perusahaan dalam mewujudkan perusahaan yang berintegritas. Salah satu bentuk *good governance* dalam suatu entitas adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal (Rae dkk., 2017).

Sistem Pengendalian Internal ini memiliki lima komponen salah satunya adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas Pengendalian merupakan aturan, kebijakan, standar operasional prosedur, dan bahkan sistem dalam mewujudkan entitas bisnis yang reliabel dan relevan dalam operasional bisnisnya, menghasilkan laporan

keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, efektif dan efisien dalam operasional bisnis, serta menjabarkan kegiatan-kegiatan proaktif dari sebuah entitas dalam rangka perwujudan *good governance*. Aktivitas pengendalian juga di dalamnya adalah kegiatan pencegahan kecurangan termasuk *whistleblowing system*. Menurut Tuanakotta (2010) penerapan *whistleblowing system* pada beberapa negara terbukti efektif mengurangi kecurangan di bidang keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulida dkk (2021) bahwa di Indonesia penerapan *whistleblowing system* berdampak signifikan pada pencegahan kecurangan. *Whistleblowing* merupakan sistem deteksi dini dalam rangka pencegahan kecurangan, dimana dengan sistem tersebut membuat orang akan berpikir ulang sebelum melakukan kecurangan, sehingga dapat membatalkan tindakan kecurangan terutama pada laporan keuangan (Rahman, 2020).

Penelitian oleh Pamungkas dkk (2020) pun menunjukkan bahwa adanya penerapan *whistleblowing system* entitas, membuat pegawai enggan dalam melakukan tindakan kecurangan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa *whistleblowing system* meminimalisir tindak kecurangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Tata kelola perusahaan sebagai pilar dalam membentuk tingkat efisiensi dan efektivitas sistem perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan segala unsur yang berhubungan dengan kebijakan melibatkan pihak-pihak manajemen dan

pemilik modal dalam mewujudkan tujuan sebuah perusahaan. Menurut Hardiningsih (2010) bahwa hubungan salah satu indikator dari tata kelola perusahaan merupakan kepilikan manajerial. Ppenelitian Ismiyanti (2015) kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Rani (2016) tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah yang hasilnya dapat digeneralisasi (Martono, 2012).

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yaitu penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Zulganef, 2008). Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Perusahaan sektor jasa dipilih karena selama tahun 2019 sampai tahun 2022 sektor ini yang paling banyak melaporkan whistleblowing system meskipun pelaporan whistleblowing system yang masih bersifat sukarela. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013) dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Pemilihan Sampel

Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022	120
Perusahaan yang tidak melaporkan whistleblowing system	420
Perusahaan yang mengungkapkan Tata Kelola Perusahaan	415
Jumlah sampel memenuhi kriteria	85
Jumlah Sampel 85 x 3 tahun	255

Data diolah (2022)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah whistleblowing system dan tata kelola perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah pengungkapan kecurangan laporan keuangan. Berikut indikator yang digunakan pada masing-masing variabel:

variabel	Indikator
Kecurangan atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> F-Score = $\frac{\text{Accrual Quality} + \text{Financial Performance}}{\text{WC} + \text{NCO} + \text{FIN}}$ <i>Average Total Asset</i> <i>Financial performance = change in receivable + change in inventories + change in cash sales + change in earnings</i>

Wistleblo wing System	Jumlah Item yang dilaksanakan Jumlah Item Menurut KKNG
Tata Kelola Perusahaan (Dewan Komisaris Independen)	IND = Total komisaris independen/total dewan komisaris

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2019-2022 pada sektor manufaktur. Perusahaan yang dijadikan sebagai kriteria merupakan perusahaan yang menerapkan *whistleblowing system*.

4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Berdasarkan uji normalitas melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,705 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil analisis tersebut mengindikasikan bahwa residual yang ada berdistribusi normal. Dapat disimpulkan variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi residual yang normal ataupun tidak.

4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu dengan melihat hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Analisis multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai tolerance value, jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance-nya > 0,10 maka disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai VIF variabel Independensi sebesar 1.061 nilai tolerance sebesar 0,942; variabel *Whistleblowing system* sebesar 1.061 nilai tolerance sebesar 0,942. Semua variabel independen tersebut nilai VIF-nya (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dengan tolerance di atas 0,10. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas.

4.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,108	,632		-4,914	,000
Whistleblowing System	-,950	,437	,209	-2,175	,033
Tata Kelola Perusahaan	-,084	,197	,037	-,424	,013

terlihat dari probabilitas signifikan tiap variabel yang tingkat kepercayaan masing-masing variabel berkisar antara 0,240 sampai dengan 0,961 diatas 5%.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis mengenai pengaruh *whistleblowing system* dan Tata Kelolah Perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,03 dimana < 0,05 dan nilai beta pada *unstandardizes Coefficients* positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kemudian tata kelola perusahaan sebagai variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Nilai signifikansi *wistleblowing system* terhadap kecurangan laporan keuangan sebesar 0,33 (< 0,05) dan nilai beta pada *Unstandardized Coefficient* negatif. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima. Selanjutnya, nilai signifikansi tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan sebesar 0,13 (< 0,05) an nilai beta pada *Unstandardized Coefficient* negatif. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima.

4.4.1 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil uji analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi *whistleblowing system* terhadap kecurangan laporan keuangan dengan

arah negatif. Artinya semakin tinggi tingkat *whistleblowing system* semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan.

Penerapan *whistleblowing system* pada dasarnya mempermudah pengawasan dalam memperoleh informasi yang berkenaan dengan kecurangan yang harus diungkapkan. Setiap perusahaan terutama perusahaan dalam sektor manufaktur merupakan organisasi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Hal ini yang bisa menjadi faktor sulitnya pengungkapan informasi yang sebenarnya terutama dalam penyajian laporan keuangan. Namun, apabila perusahaan telah membantu *whistleblowing system* maka secara tidak langsung sistem tersebut akan mendeteksi, mencegah, dan menangani kecurangan baik yang bersifat personal maupun kolektif. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Pramudyastuti (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing system* membutuhkan komitmen yang tinggi dari manajemen dan semua bagian dari organisasi. Tanpa adanya dorongan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial dan masyarakat penerapan *whistleblowing system* tidak akan berjalan secara efektif.

4.4.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji analisis regresi dapat dikatakan hipotesis kedua diterima, dimana tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dengan arah negatif. Artinya dari signifikansi dengan arah negatif adalah semakin tinggi tata kelola perusahaan terutama pada kepemilikan manajerial, semakin rendah tindakan kecurangan atas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial secara langsung menunjukkan adanya tanggung jawab secara moral terhadap pengelolaan perusahaan, maka dari itu manajemen

akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Semakin besar kepemilikan saham manajerial, semakin tinggi perhitungan risiko yang dapat mempengaruhi kecurangan atas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rani (2016) yaitu tidak terdapat pengaruh faktor kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan dan negative terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya semakin tinggi praktik *whistleblowing system* semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan.
2. Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang ditunjukkan dengan indikator kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh signifikan dan negative terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah gunakan variabel-variabel lain yang mampu meinterpretasikan faktor-faktor yang menentukan tingkat kecurangan laporan keuangan pada perusahaan.

6. REFERENSI

- Arens, A., dkk. 2015. *Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2018. *Report To The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud And Abuse*.

- https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtnn/2018/R_TTN-Asia-pasific-Edition.pdf
- Austin. (2016). Diambil kembali dari Report to Nations. Association of Certified Fraud Examiners.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principles of Auditing An Introduction to International Standards on Auditing* (Third). London: Pearson Education Limited.
- ACFE. (2018). Global Fraud Study: Report to the nation on occupational fraud and abuse Asia-Pacific Edition.
- ACFW (2018). Report to The Nations 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse.: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2222608>
- Gaurina, N., Purnamawati, G., & Atmadja, A. (2017). Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Ismiyanti, Fitri dan Prastihia, Chintia. 2015. "Mekanisme Corporate Governance dan Kecurangan Laporan Keuangan". *DeReMa Jurnal Manajemen* Vol. 10 No.2 Tahun 2015.
- Prasetyo, Andrian Budi. 2016. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan". *Soedirman Accounting Review* Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016.CFE. (2

